

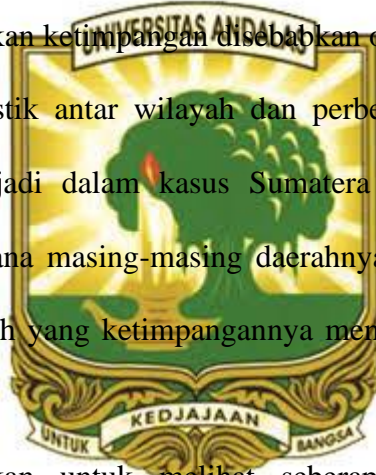
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini yaitu permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan. Fenomena ini muncul akibat kegagalan dalam pelaksanaan pemerataan distribusi pendapatan. Selama ini, pertumbuhan ekonomi yang dipandang sebagai tolak ukur keberhasilan perekonomian nyatanya tidak cukup ampuh untuk menciptakan kesejahteraan. Distribusi pendapatan yang adil dan merata merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.

Sjafrizal (2017) menyatakan ketimpangan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya seperti perbedaan karakteristik antar wilayah dan perbedaan alokasi dana pembangunan antar wilayah. Hal ini terjadi dalam kasus Sumatera Barat yang terbagi menjadi 12 kabupaten dan 7 kota, dimana masing-masing daerahnya mengalami tingkat ketimpangan yang tidak sama. Ada daerah yang ketimpangannya meningkat, berfluktuasi, dan ada pula yang menurun.



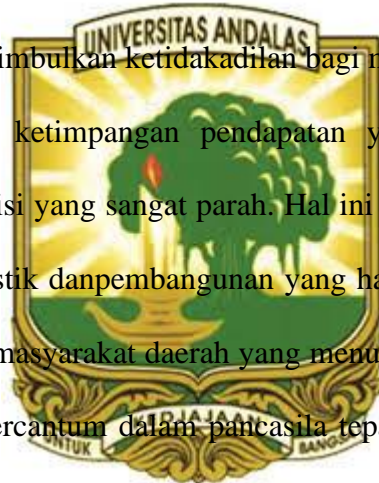
Indikator yang digunakan untuk melihat seberapa besar ketimpangan distribusi pendapatan adalah rasio gini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2014-2018 memiliki tren yang tidak sama. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Solok Selatan mengalami tren yang meningkat. Berbanding terbalik dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, dan Kota Sawahlunto yang mengalami tren penurunan, sedangkan sisanya mengalami fluktuasi. Rasio gini tertinggi yang pernah dicapai yaitu sebesar 0,38 yang mana terjadi di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2015 dan Kota Padang Panjang tahun 2016.

Ketimpangan pendapatan memang tidak dapat dihilangkan, karena merupakan suatu fenomena yang pasti selalu ada dan sudah melekat dengan perekonomian. Namun, masalah ketimpangan juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Laporan *World Economic Forum* (WEF) tahun 2014 dalam Wibowo (2016) menempatkan ketimpangan pendapatan di peringkat keempat dari sepuluh risiko global yang mendapat prioritas penanganan serius.

Penanganan ini harus segera ditindaklanjuti guna menghindari efek negatif yang dapat ditimbulkan. Menurut Todaro (2006), efek negatif dari ketimpangan pendapatan yaitu dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi asset yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas dan memperkuat kekuatan politis golongan kaya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Sebelum era reformasi, ketimpangan pendapatan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia berada pada kondisi yang sangat parah. Hal ini dikarenakan pemerintahan saat itu yang masih bersifat sentralistik dan pembangunan yang hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini memicu kemarahan masyarakat daerah yang menuntut akan keadilan yang dijanjikan negara sebagaimana yang tercantum dalam pancasila tepatnya sila ketiga. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan kebijakan dengan melaksanakan otonomi daerah.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 menjadi landasan awal dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Otonomi daerah memberikan kewenangan untuk daerah dalam mengurus pemerintahannya secara mandiri dengan mengurangi intervensi pemerintah pusat. Namun, terdapat pengecualian untuk bidang-bidang tertentu yang tidak diberikan kewenangannya kepada daerah dan telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam bidang keuangan, salah satu implementasi kebijakan dari



otonomi daerah ini disebut desentralisasi fiskal, dan kebijakan ini prakteknya telah dimulai sejak Januari tahun 2001.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah. Salah satu perwujudan dari kebijakan ini yaitu pemberian dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tujuan dari pemberian dana transfer ini yaitu untuk mewujudkan pemerataan antar daerah sehingga ketimpangan dapat dikurangi.

Berbagai studi pun sudah banyak dilakukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan desentralisasi fiskal dalam mengatasi ketimpangan. Studi yang dilakukan oleh Sidig (2018) menemukan bahwa DAU dan DBH per kapita mampu menurunkan ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Begitu pula dengan hasil penelitian Wardha, Juanda, dkk (2013) mengenai dampak transfer pusat terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia dimana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun, temuan penelitian Putri dan Natha (2014) menunjukkan hasil yang berseberangan dengan sebelumnya. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) justru meningkatkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali.

Hasil riset *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menyebutkan bahwa dana transfer yang berupa DAU dan DAK memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. DAU secara statistik memiliki korelasi positif dengan indeks gini, artinya kenaikan DAU juga akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Disisi lain, DAK memiliki korelasi negatif dan berkontribusi menurunkan ketimpangan (Rusli Abdullah dalam CNN Indonesia 2018, diakses 25 September 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai masalah ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Sumatera Barat dengan judul penelitian **“Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2014-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Satu dari sekian problematika ekonomi yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata adalah permasalahan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Perbedaan karakteristik antar wilayah dianggap berpengaruh kuat terhadap munculnya ketimpangan ini.

Salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia adalah otonomi daerah yang di implementasikan dalam bentuk desentralisasi fiskal. Karena ketidaksamaan potensi dan karakteristik setiap daerah di Indonesia, ini bisa menimbulkan ketimpangan ekonomi antar daerah. Untuk itu pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada setiap daerah otonom yang proporsinya disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Dana transfer tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Sumatera Barat yang dilihat dari rasio gini sejak tahun 2014-2018 menunjukkan tren yang fluktuatif. Untuk kabupaten/kota memiliki tren yang tidak sama, ada yang rasio gininya meningkat, dan ada juga yang menurun. DAU untuk Sumatera Barat cenderung meningkat, namun alokasi untuk kabupaten/kota mengalami fluktuasi. DAK cenderung mengalami peningkatan meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2018. Sedangkan DBH mengalami fluktuasi yang tidak



terlalu signifikan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Peningkatan dana transfer daerah harusnya efektif dalam menurunkan rasio gini di wilayah tersebut.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, dapat ditarik rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, dapat dijabarkan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Menganalisis Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat untuk:



- a. Menjadi sumbangan pemikiran dan menambah wawasan baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca.
- b. Menjadi referensi/rujukan untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa.
- c. Dapat menjadi alat evaluasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat perencanaan kebijakan terkait dana mana yang harus dikembangkan sebagai upaya mengurangi ketidakmerataan pendapatan khususnya di Sumatera Barat.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan kepada DAU, DAK, dan DBH yang masing-masingnya akan dirinci menjadi per kapita dan akan menjelaskan pengaruhnya terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas 6 bab, yang secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, selanjutnya akan dirumuskan permasalahan apa yang mendasari penelitian dan diuraikan menjadi beberapa rumusan masalah. Setelah perumusan masalah, selanjutnya akan dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian beserta ruang lingkup dari penelitian. Terakhir, akan dijabarkan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi penjelasan literatur mengenai ketimpangan distribusi pendapatan, konsep otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan dana perimbangan beserta komponen-komponennya yang terdiri atas DAU, DAK, dan DBH. Selanjutnya,



juga disertai dengan penelitian terdahulu dan apa perbedaannya dengan penelitian terdahulu, hipotesis, hubungan antar variabel, dan diakhiri dengan kerangka analisis.

BAB III : METODOLOGI

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa metode dalam proses penelitian seperti jenis penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, metode analisis dan pengumpulan data, serta diakhiri dengan definisi operasional variabel.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum daerah penelitian, seperti luas dan letak geografis, kondisi demografi, kondisi ketimpangan pendapatan, dan perkembangan dana DAU, DAK, dan DBH per kapitanya.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil dari olah data penelitian beserta pembahasannya.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini, akan diuraikan kesimpulan dan saran.

